

Implementasi Pendidikan Karakter Lokal *Kasundaan* Berbasis Kebijakan SPBS di Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Omay Komara Nurjaman¹ & Julia²

¹Litbang Bappppeda Kab. Sumedang
Jl. Prabu Gajah Agung Sumedang
Email: omayk.nurjaman@yahoo.co.id

²PGSD UPI Kampus Sumedang
Jl. Mayor Abdurachman No. 211 Sumedang
Email: juli@upi.edu

ABSTRACT	ABSTRAK
<p>This study aims to analyze the implementation of policy on <i>kasundaan</i> character education based on Sumedang Regent regulation about <i>Sumedang Puseur Budaya Sunda</i> (SPBS). The method used was a survey to the elementary school students, which was completed with interviews and FGD. The results of the study found that: (1) SPBS was only instructed in the "SKPD" environment only in the form of Thursday using <i>kasumedangan</i> dress and Sundanese language, (2) no education design of <i>kasundaan</i> characters in elementary school, (3) the majority of elementary school students already have the expected behavior in the context of <i>kasundaan</i> values based on Regent's regulation on SPBS. However, a few other minorities, in fact, show the unexpected behavior that potentially leads the students to negative behavior. Thus, it can be concluded that the implementation of <i>kasundaan</i> character education in elementary school in Sumedang conducted only based school curriculum in spite of Regent's regulation.</p> <p>Keywords: character education, local, <i>kasundaan</i>, sundanese culture, spbs.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tentang pendidikan karakter <i>kasundaan</i> berdasarkan peraturan Bupati Sumedang tentang <i>Sumedang Puseur (Pusat) Budaya Sunda</i> (SPBS). Metode yang digunakan adalah survey kepada siswa sekolah dasar, yang dilengkapi dengan wawancara dan FGD. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) SPBS baru diinstruksikan pada lingkungan SKPD saja dalam bentuk Kamis berpakaian <i>kasumedangan</i> dan berbahasa Sunda, (2) belum ada desain pendidikan karakter <i>kasundaan</i> di sekolah dasar, (3) mayoritas peserta didik sekolah dasar sudah memiliki perilaku sebagaimana diharapkan dalam konteks nilai <i>kasundaan</i> berdasarkan peraturan Bupati tentang SPBS. Namun demikian, sebagian kecil lainnya notabene menunjukkan perilaku yang belum sesuai harapan, dan hal ini menjadi potensi peserta didik untuk mengarah pada perilaku yang negatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan karakter <i>kasundaan</i> di sekolah dasar di Kabupaten Sumedang dilakukan tanpa berlandaskan kepada peraturan Bupati tentang SPBS, namun merujuk pada kurikulum sekolah saja.</p> <p>Kata Kunci: pendidikan karakter, lokal, <i>kasundaan</i>, budaya sunda, spbs.</p>

How to Cite: Nurjaman, O., & Julia, J. (2018). Implementasi Pendidikan Karakter Lokal *Kasundaan* Berbasis Kebijakan SPBS di Kabupaten Sumedang Jawa Barat. *Mimbar Sekolah Dasar*, 5(1). doi:<http://dx.doi.org/10.17509/mimbar-sd.v5i1.9292>.

PENDAHULUAN ~ Sudah beberapa tahun pemerintah Indonesia menjalankan sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada pembangunan budaya dan

karakter bangsa, yakni sejak dicanangkannya pembangunan budaya dan karakter bangsa yang diawali dengan dideklarasikannya "Pendidikan

Budaya dan Karakter Bangsa" sebagai gerakan nasional awal Januari 2010. Pencanangan ini ditegaskan kembali dalam pidato presiden pada peringatan hari pendidikan nasional 2 Mei 2010 (Marzuki, 2013, p. 66). Setelah deklarasi tersebut, patut kita akui bahwa di Indonesia secara drastis berbagai bidang ilmu berbondong-bondong berubah haluan dan menyatakan diri sebagai bidang ilmu pembentuk karakter. Terbukti atau tidak, jelas terlihat bahwa banyak penelitian atau publikasi mengenai upaya membangun karakter melalui berbagai bidang ilmu dalam jalur pendidikan formal.

Menurut Marzuki (2013, p. 66), deklarasi nasional tersebut harus jujur diakui oleh sebab kondisi bangsa ini yang semakin menunjukkan perilaku antibudaya dan antikarakter. Perilaku antibudaya bangsa ini di antaranya ditunjukkan oleh semakin mudarnya sikap kebhinekaan dan kegotong-royongan bangsa Indonesia, di samping begitu kuatnya pengaruh budaya asing di tengah-tengah masyarakat. Adapun perilaku antikarakter bangsa ini di antaranya ditunjukkan oleh hilangnya nilai-nilai luhur yang melekat pada bangsa Indonesia, seperti kejujuran, kesantunan, dan kebersamaan serta munculnya berbagai kasus kriminal seperti yang dipaparkan di atas.

Untuk mengantisipasi persoalan antibudaya dan antikarakter, dalam Kebijakan Nasional Pembangunan

Karakter Bangsa (Pemerintah, 2010), disebutkan bahwa bentuk kegiatan pada program pendidikan karakter bangsa konteks mikro, dapat dibagi menjadi empat, yakni: kegiatan belajar mengajar; kegiatan kehidupan keseharian di satuan pendidikan; kegiatan ekstrakurikuler; kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat (Dharmawan, 2014, p. 2). Program pendidikan yang ditawarkan oleh pemerintah tersebut, tentu saja perlu dikembangkan lagi ke dalam bentuk-bentuk pembelajaran atau kegiatan yang lebih *real*, dan justru di tingkat satuan pendidikanlah persoalan kongkretisasi program itu terjadi, karena jelas berhubungan dengan budaya dan karakter para pendidik sendiri di lingkungan sekolah.

Buktinya, bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat Sumedang khususnya, dikejutkan dengan gemparnya ratusan warga termasuk anak-anak yang sakit mual-muntah bahkan meninggal karena menenggak minuman keras oplosan. Di samping kasus itu, Pikiran-rakyat.com (2014) melaporkan, delapan pelajar SMP warga Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pesta menenggak minuman keras oplosan. Satu orang kritis, sementara tujuh lainnya mengalami mual dan pusing, sehingga semuanya akhirnya menjalani pemeriksaan kesehatan. Belum lagi kasus-kasus miras lainnya yang melibatkan peserta didik dan tidak terekspos ke permukaan, yang mengakibatkan

dikeluarkannya mereka dari sekolah. Bukankah ini sebuah bukti dari kejahatan antibudaya dan antikarakter yang dilakukan secara berjamaah. Padahal, pendidikan budaya dan pendidikan karakter sudah dimulai sejak beberapa tahun silam secara nasional.

Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) secara bertahap mulai Tahun Ajaran 2016. Pemerintah Kabupaten Sumedang sendiri, sebenarnya sudah merintis pembangunan budaya dan karakter kelokalan melalui Peraturan Bupati (Perbup) nomor 113 tahun 2009 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (SPBS) (Bappeda, 2009). Yang mana dalam Perbup ini dijelaskan bahwa pengembangan kearifan budaya daerah sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu prioritas Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013, dengan tujuan untuk memperkokoh jatidiri aparatur pemerintah daerah dan masyarakat serta menguatkan daya saing daerah menuju terwujudnya Kabupaten Sumedang Sejahtera, Agamis dan Demokratis pada Tahun 2025 (Motto: Sumedang Sehati). Meskipun programnya jangka menengah dan telah lewat masa penargetannya, namun *output* yang diharapkan dari RPJMD ini tentu saja bukan perilaku masyarakat yang bermoral dan beretika untuk jangka menengah

saja, namun secara kontinyu melekat dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi jika mengacu pada visi Kabupaten Sumedang, yang bercita-cita untuk mewujudkan Sumedang yang sejahtera, nyunda, mandiri dan agamis tahun 2018 (Motto: Sumedang Senyum Manis), tentu saja untuk mewujudkannya perlu strategi dan sinergitas yang nyata di antara berbagai pihak, terutama pihak pemerintah dengan pihak sekolah sebagai jalur pembibitan budaya dan karakter, karena pembudayaan perilaku dan pembangunan karakter perlu dilakukan antara lain melalui jalur pendidikan.

Beberapa penelitian terkait dengan SPBS dengan fokus yang berbeda, antara lain dilakukan oleh Nugraha, Komariah, and Subekti (2014), dan Rikatri (2016). Tahun 2015, jaringan penelitian Bappeda Kabupaten Sumedang pernah melakukan penelitian pendidikan budaya dan karakter pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) (Fahdini, Julia, & Suhandani, 2015). Melalui penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa - meskipun sudah dirilis Perbup mengenai pendidikan karakter *kasundaan*, namun kenyataannya di SMA - penerapan pendidikan karakter *kasundaan* belum dilaksanakan secara sistematis, atau belum memiliki desain/model khusus dalam proses pembelajarannya. Mayoritas guru melakukan penyisipan karakter dalam proses pembelajaran di kelas sebagai bentuk pendidikan karakter.

Seperti melalui hapalan Al-Quran, tugas-tugas belajar, diskusi kelompok, ceramah, sosio-drama, pengamatan dan teguran, dan ada pula yang menerapkannya melalui keteladanan guru. Sementara di luar kelas, pendidikan karakter diterapkan antara lain melalui kegiatan perlombaan dan ekstrakurikuler.

Pada umumnya, proses pembelajaran di satuan pendidikan masih sangat terfokus pada pengembangan aspek akademik saja, sementara pengembangan pada aspek perilaku atau karakter cenderung diabaikan. Padahal, berbagai penelitian membuktikan bahwa aspek perilaku membawa dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan atau kesuksesan seseorang. Seperti hasil penelitian di Institut Teknologi Carnegie yang mengatakan bahwa dari 10.000 orang sukses, 85% sukses karena faktor kepribadian, dan 15% karena faktor teknis (Kurniawan, 2010; Mansur, 2014). Albert Edward Wiggam juga melakukan penelitian dan mendapatkan hasil bahwa dari 4000 orang yang kehilangan pekerjaan, 400 orang (10%) karena kemampuan teknis, sedangkan 3.600 orang (90%) karena faktor kepribadian (Kurniawan, 2010; Mansur, 2014). Penelitian serupa juga dilakukan di Universitas Stanford, dan disimpulkan bahwa kesuksesan ditentukan oleh 87,5% *attitude* (sikap), dan hanya 12,5% karena kemampuan akademik seseorang (Mansur, 2014; Mardiyansyah & Senda, 2011).

Berdasarkan studi awal, di kabupaten Sumedang pada umumnya belum dilakukan penyelenggaraan pendidikan karakter dengan model tertentu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif agar dapat dibuat rumusan kebijakan yang tepat, maka melalui penelitian ini dikaji persoalan pendidikan budaya dan karakter pada tataran sekolah dasar terutama karakter kelokalan khususnya karakter *kasundaan* sebagai awal pembangunan karakter kebangsaan, sehingga dapat diketahui dengan pasti bagaimana pelaksanaannya di sekolah dasar dan dampaknya pada peserta didik. Nilai-nilai *kasundaan* yang dipandang memiliki nilai kearifan begitu tinggi, digali penerapannya melalui pengalaman peserta didik selama mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang terkait dengan implementasi Sumedang Puseur Budaya Sunda; (2) menganalisis desain penerapan pendidikan karakter *kasundaan* pada peserta didik di Sekolah Dasar Kabupaten Sumedang; (3) menganalisis hasil implementasi pendidikan karakter *kasundaan* pada peserta didik di Sekolah Dasar di Kabupaten Sumedang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menggunakan desain penelitian kualitatif yang dilengkapi dengan *Focus*

Group Discussions (FGD). Tempat penelitian adalah di Sekolah Dasar di kabupaten Sumedang propinsi Jawa Barat, dengan subjek penelitian adalah siswa-siswi Sekolah Dasar kelas enam (tinggi) di kabupaten Sumedang dari kawasan pedesaan, kawasan peralihan, dan kawasan perkotaan, dengan subjek berjumlah 261 orang yang dipilih dengan cara *purposive sampling*.

Untuk menjawab pertanyaan pertama, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan FGD dengan pihak terkait di dinas pendidikan, dewan pendidikan, dewan kebudayaan, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Untuk menjawab pertanyaan kedua, dilakukan wawancara kepada para guru dan kepala sekolah. Sementara untuk menjawab pertanyaan ketiga, pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan instrumen survei kepada peserta didik sekolah dasar kelas 6, dengan bentuk pertanyaan merujuk kepada indikator-indikator karakter *kasundaan* yang tercantum dalam peraturan bupati Sumedang nomor 113 tahun 2009 tentang SPBS, yakni karakter *taqwa, someah, surti, jembar, brukbrak, guyub, motekar, tarapti – taliti - ati-ati, junun – jucung, dan punjul - luhung*. Responden diminta untuk menjawab satu atau lebih jawaban yang dikembangkan oleh peneliti dan disediakan dalam instrumen.

HASIL

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Terkait dengan Implementasi Sumedang Puseur Budaya Sunda

Berdasarkan hasil FGD, dapat diidentifikasi bahwa perbup tentang SPBS diimplementasikan secara eksplisit dari pihak Bupati kepada lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sumedang melalui program *Kemis (Kamis) Nyunda* (berpakaian *kasumedangan* dan berbahasa Sunda). Melalui program ini, para pegawai di lingkungan SKPD diharuskan menggunakan pakaian *kasumedangan* dan berbicara dengan bahasa Sunda disetiap hari Kamis. Dinas pendidikan pun sebagai salah satu SKPD, turut melaksanakan program ini, mulai dari kepala dinas sampai guru di tingkat satuan pendidikan. Sementara itu, untuk implementasi dari nilai-nilai karakter yang terdapat dalam perbup SPBS, tidak ada strategi khusus untuk tahapan-tahapan penerapan sampai evaluasinya, sehingga muncul kesan bahwa implementasi nilai-nilai karakter *kasundaan* hanya berupa himbauan saja yang ditujukan untuk SKPD.

Salah satu hal yang belum tersentuh dalam implementasi nilai-nilai karakter *kasundaan*, adalah integrasi antara perbup SPBS dengan kurikulum di sekolah dasar. Adapun pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah dasar bersumber pada kurikulum 2013, belum ada upaya untuk menurunkan nilai-nilai karakter yang diusung dalam SPBS ke dalam kurikulum di

satuan pendidikan. Seperti kurikulum muatan lokal tentang bahasa Sunda atau etika, nota bene bukan merupakan sebuah proses integrasi dari perbup SPBS, namun kurikulum yang berdiri sendiri berdasarkan program-program pendidikan dari pemerintah pusat.

Ada pula sebuah upaya yang dilakukan oleh dewan kebudayaan sebagai salah satu pihak yang menjadi pengusung lahirnya perbup SPBS, yaitu dikenal sebagai akselerasi SPBS. Salah satu contohnya adalah sosialisasi lagu SPBS yang di dalam liriknya menyebutkan nilai-nilai karakter *kasundaan*. Namun hasil FGD mengidentifikasi, bahwa arah dewan kebudayaan masih terbatas pada pengembangan pada ranah seni saja. Berbagai upaya yang dilakukan oleh dewan kebudayaan pun untuk lebih secara menyeluruh menerapkan perbup SPBS, terhalang dengan berbagai kendala, baik dari sisi dukungan materil maupun dari sisi regulasi.

Dengan demikian, setelah digulirkan perbup SPBS sejak tahun 2009, belum lahir regulasi atau strategi-strategi implementasi atau tahapan pengimplementasiannya yang jelas terstruktur dari pembuat kebijakan untuk masyarakat Kabupaten Sumedang, khususnya untuk menerapkan nilai-nilai *kasundaan* pada tataran sekolah dasar yang berlandaskan pada perbup SPBS.

Desain Penerapan Pendidikan Karakter Kasundaan pada Peserta Didik di Sekolah Dasar di Kabupaten Sumedang

Hasil wawancara dengan guru dan kepala sekolah menjelaskan, bahwa pada umumnya di sekolah dasar di Kabupaten Sumedang, belum memiliki desain khusus untuk menerapkan pendidikan karakter kasundaan yang berbasis SPBS. Hal ini disebabkan karena belum terintegrasinya antara kurikulum di sekolah dasar dengan perbup SPBS. Oleh karena itu, mayoritas sekolah mengembangkan pendidikan karakter berdasarkan inisiatif dari masing-masing guru atau kepala sekolahnya. Seperti pendidikan karakter yang diturunkan ke dalam motto/visi/misi sekolah, atau pembiasaan penerapan nilai-nilai karakter di sekolah, misalnya membaca al-quran sebelum pembelajaran dimulai. Ada juga yang menerapkan nilai-nilai karakter melalui perlakuan, seperti memberikan sanksi apabila ditemukan ada peserta didik yang membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah, atau berbicara kasar di lingkungan sekolah.

Melalui beragam cara itu pun, guru dan kepala sekolah memandang bahwa terdapat kelemahan dalam menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik, yakni tidak selarasnya antara perlakuan yang diberikan di sekolah dengan perlakuan yang diberikan oleh orang tua peserta didik, sehingga apa yang ditanamkan di sekolah, seringkali dimentahkan lagi oleh orang tua peserta

didik. Dengan kata lain, budaya di sekolah sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosio-budaya orang tua peserta didik. Oleh sebab itu, diperlukan sistem evaluasi pendidikan karakter di sekolah dasar yang terintegrasi dengan lingkungan orang tua peserta didik.

Kondisi ini telah merepresentasikan bahwa pada tataran sekolah dasar di Kabupaten Sumedang pada umumnya, belum diterapkan model Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah pusat. Hal ini terbukti dari informasi yang diberikan oleh guru dan kepala sekolah yang diwawancarai, mereka belum mendapatkan sosialisasi mengenai model PPK yang terbaru. Padahal, Kabupaten Sumedang menjadi salah satu Kabupaten di Indonesia yang menjadi tempat untuk uji coba pengimplementasian PPK. Di mana dalam PPK dimaksud, telah disediakan berbagai pedoman PPK baik untuk guru, kepala sekolah, pengawas, maupun komite sekolah. Dengan demikian, kondisi di sekolah dasar, di samping mayoritas belum mendapatkan sosialisasi model PPK, juga belum memiliki desain untuk menerapkan nilai-nilai karakter *kasundaan*. Sementara itu, nilai-nilai karakter *kasundaan* dapat menjadi pendukung untuk diterapkannya lima nilai-nilai karakter yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Karena pada dasarnya, banyak nilai-nilai karakter *kasundaan* yang senafas dengan nilai-nilai karakter dari program PPK.

Hasil Implementasi Pendidikan Karakter Kasundaan pada Peserta Didik di Sekolah Dasar di Kabupaten Sumedang

Dampak pendidikan karakter terhadap perilaku peserta didik pada jenjang sekolah dasar, dapat diidentifikasi melalui pernyataan-pernyataan peserta didik sebagai berikut:

Karakter Taqwa

Pada aspek ini ditanyakan perihal ketaatan pada ajaran agama sebagai representasi ketaqwaan terhadap Tuhan. Dari 261 responden, sebanyak 170 (65,13%) orang menyatakan sebagai orang yang sangat taat dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama, sebanyak 89 (34,09%) orang menyatakan sebagai orang yang kurang taat dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama, dan sebanyak 2 (0,76%) orang tidak memberikan jawaban.

Persentase di atas tentu saja bukan hal yang membanggakan, karena pada dasarnya taqwa adalah dasar pembentukan karakter, dan karena taqwa mengandung banyak nilai (Majid, 2011). Dengan kata lain, jika ketaqwaan seseorang rendah, maka dapat memengaruhi seluruh moralnya dan mengganggu berjalannya kebaikan, karena taqwa berkaitan dengan kepatuhan dalam menjalankan ajaran Tuhan atau menjauhi larangan Tuhan. Artinya, taqwa dapat diartikan pula sebagai perilaku yang penuh dengan kebaikan. Lickona (2009) menegaskan

bahwa karakter yang baik adalah proses psikologis *knowing the good, desiring the good, and doing the good*.

Karakter *Someah*

Pada aspek ini digali lima hal yang berkaitan dengan sikap *someah*, dari 261 responden, dapat teridentifikasi beberapa hal berikut: (1) Sebanyak 193 orang (73,94%) menyatakan selalu bersikap ramah terhadap teman-teman, sebanyak 62 orang (23,75%) bersikap ramah hanya pada orang-orang tertentu saja, dan sebanyak 6 orang (2,29%) mengaku tidak bisa bersikap ramah; (2) Sebanyak 208 (79,69%) orang mengakui perbuatannya lebih banyak sesuai dengan ucapannya, sebanyak 29 (11,11%) orang mengakui bahwa perbuatannya lebih banyak tidak sesuai dengan ucapannya, sebanyak 21 (8,04%) orang menyatakan tidak terlalu memperdulikan antara ucapan dan perbuatan, dan sebanyak 3 (1,14%) orang tidak memberikan jawaban; (3) Sebanyak 33 (12,64%) orang memprioritaskan untuk memilih teman bermain/berkelompok yang pintar dan fisiknya sempurna, dan sebanyak 228 (87,36%) orang memilih teman bermain/berkelompok dengan siapa saja meskipun tidak pintar dan fisiknya memiliki kekurangan; (4) Sebanyak 136 (52,10%) orang menyatakan lebih senang menceritakan kepada orang lain jika melakukan kebaikan atau memiliki kelebihan/prestasi, sebanyak 122 (46,74%) orang menyatakan lebih senang tidak menceritakannya kepada orang lain, dan sebanyak 3 (1,14%) orang tidak

memberikan jawaban; dan (5) Sebanyak 98 (37,54%) orang menyatakan memberikan senyuman pada siapa pun orang yang mulai memberikan senyuman, sebanyak 10 (3,83%) orang memberikan senyuman hanya pada orang-orang tertentu, sebanyak 148 (56,71%) orang selalu memulai memberikan senyuman kepada siapa pun yang melihat, sebanyak 2 (0,76%) orang tidak suka tersenyum, dan sebanyak 3 (1,14%) orang tidak memberikan pernyataan.

Karakter *Surti*

Pada aspek ini ditanyakan lima hal berkaitan dengan sikap *surti*, dari 261 responden, dapat teridentifikasi beberapa hal berikut: (1) Sebanyak 220 (84,29%) orang menyatakan lebih sering menolong orang yang sedang dalam kesusahan, sebanyak 4 (1,53%) orang menyatakan lebih sering membiarkan orang yang sedang dalam kesusahan, sebanyak 36 (13,79%) orang mengakui cukup merasakan bahwa ada orang sedang dalam kesusahan, dan sebanyak 1 (0,38%) orang tidak memberikan jawaban; (2) Sebanyak 232 (88,88%) orang menyatakan segera meminta maaf jika ada orang lain tersakiti karena perilakunya, sebanyak 12 (4,59%) orang menyatakan merasa bersalah jika ada orang lain tersakiti karena perilakunya, namun merasa gengsi untuk meminta maaf, sebanyak 13 (4,98%) orang menyatakan merasa puas jika ada orang lain tersakiti karena perilakunya, apalagi jika orang yang tersakiti pernah menyakitinya, dan sebanyak 4 (1,53%)

orang menyatakan tidak pernah merasa menyakiti orang lain; (3) Sebanyak 30 (11,49%) orang menyatakan biasa membela teman yang lebih akrab jika ada di antara temannya yang bertengkar dan salahsatu dari mereka mengadu kepadanya, sebanyak 76 (29,11%) orang menyatakan biasa membela kedua belah pihak, sebanyak 152 (58,24%) orang menyatakan biasanya tidak memihak siapa pun, dan sebanyak 3 (1,14%) orang tidak memberikan jawaban; (4) Sebanyak 52 (19,92%) orang menyatakan senang menanggapi permasalahan aktual yang terjadi di lingkungan sekitar, sebanyak 83 (31,80%) orang menyatakan tidak suka ikut campur dalam masalah apapun, dan sebanyak 126 (48,27%) orang menyatakan lebih senang mengurus masalah yang menyangkut diri sendiri; dan (5) Sebanyak 115 (44,06%) orang menyatakan selalu menuruti kata hati dalam menyikapi permasalahan di sekelilingnya, sebanyak 93 (35,63%) orang menyatakan hanya percaya pada nalar-logis untuk menyikapi permasalahan, sebanyak 20 (7,66%) orang lebih berusaha mempertajam kepekaan hati untuk menyikapi permasalahan, sebanyak 32 (12,26%) orang lebih berusaha mengasah nalar-logis untuk menyikapi permasalahan, dan sebanyak 1 (0,38%) orang tidak memberikan jawaban.

Karakter Jembar

Pada aspek ini ditanyakan tiga hal terkait dengan perilaku *jembar*, dari 261 responden, dapat teridentifikasi beberapa hal berikut: (1) untuk menambah

wawasan, sebanyak 97 (37,16%) orang menyatakan lebih banyak membaca di luar pelajaran, sebanyak 49 (18,77%) orang menyatakan lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang berilmu tinggi, sebanyak 108 (41,38%) orang menyatakan lebih banyak belajar melalui materi sekolah saja, dan sebanyak 7 (2,68%) orang tidak memberikan jawaban; (2) Sebanyak 246 (94,25%) menyatakan bahwa demokrasi penting karena sesuai dengan prinsip hidup, sebanyak 10 (3,83%) menyatakan demokrasi tidak penting karena tidak sesuai dengan prinsip hidup, dan sebanyak 5 (1,92%) orang tidak memberikan jawaban; dan (3) Jika ada yang menyakiti hati, sebanyak 140 (53,64%) orang mengaku gampang untuk memaafkan, sebanyak 62 (23,75%) orang mengaku selalu kesal dan agak susah untuk memaafkan, sebanyak 27 (10,34%) orang mengaku pasti menyimpan rasa dendam, dan sebanyak 32 (12,26%) orang tidak memberikan jawaban.

Karakter Brukbrak

Pada aspek ini ditelusuri tiga hal mengenai sikap *brukbrak*, dari 261 responden, dapat teridentifikasi beberapa hal berikut: (1) Sebanyak 68 (26,05%) orang menyatakan lebih bersikap transparan dalam urusan pribadi, sebanyak 29 (11,11%) orang lebih bersikap transparan dalam urusan organisasi, sebanyak 152 (58,24%) orang lebih bersikap transparan dalam urusan pribadi dan organisasi, sebanyak 10 (3,83%) orang mengaku tidak pernah bersikap transparan dalam berbagai

urusan, dan sebanyak 2 (0,76%) orang tidak memberikan jawaban; (2) Sebanyak 179 (68,58%) orang menyatakan selalu bersikap jujur dalam kondisi apa pun, dan sebanyak 68 (26,05%) orang bersikap jujur hanya dalam kondisi tertentu, sebanyak 10 (3,83%) orang menyatakan bersikap jujur bila dalam kondisi yang menguntungkan, dan sebanyak 4(1,53%) orang tidak memberikan pernyataan; dan (3) Sebanyak 86 (32,95%) orang mengakui pernah mempersulit urusan yang mudah terhadap orang lain, sebanyak 165 (63,22%) orang tidak pernah mempersulit urusan yang mudah terhadap orang lain, sebanyak 7 (2,68%) orang sering mempersulit urusan yang mudah terhadap orang lain, dan sebanyak 3 (1,14%) orang tidak memberikan pernyataan.

Karakter Guyub

Pada aspek ini ditelusuri tiga hal mengenai perilaku *guyub*, dari 261 responden, dapat teridentifikasi beberapa hal berikut: (1) Ketika ada janji yang tidak ditepati, sebanyak 208 (79,69%) orang menyatakan tetap berusaha melaksanakannya, sebanyak 30 (11,49%) orang biasanya membuat janji lagi, sebanyak 21 (8,04%) orang menyatakan tidak pernah mengingkari janji, dan sebanyak 2 (0,76%) orang tidak memberikan pernyataan; (2) Sebanyak 64 (24,52%) orang menyatakan lebih menyukai untuk bekerja sendiri, sebanyak 179 (68,58%) orang menyatakan lebih menyukai untuk bekerja sama dengan orang lain, dan sebanyak 14 (5,36%) orang menyatakan lebih menyukai

untuk bekerja sama, namun orang lain susah untuk diajak kerjasama, sebanyak 4 (1,53%) orang tidak memberikan pernyataan; dan (3) Sebanyak 133 (50,95%) orang menyatakan senantiasa mengalah demi menjaga kekompakan kelompok, sebanyak 13 (4,98%) orang senantiasa menentang orang yang berbeda pendapat dalam kelompok, dan sebanyak 109 (41,76%) orang senantiasa sependapat dengan orang lain dalam kelompok, dan sebanyak 6 (2,29%) orang tidak memberikan pernyataan.

Karakter Motekar

Pada aspek ini ditanyakan tiga hal berkaitan dengan perilaku *motekar*, dari 261 responden, dapat teridentifikasi beberapa hal berikut: (1) Sebanyak 196 (75,09%) orang menyatakan memiliki karya hasil kreativitas sendiri, sebanyak 57 (21,83%) orang menyatakan tidak memiliki karya sendiri, dan sebanyak 8 (3,06%) orang tidak memberikan pernyataan; (2) Sebanyak 130 (49,81%) orang menyatakan senang memanfaatkan benda yang ada di sekitar sehingga memiliki karya, sebanyak 126 (48,27%) orang menyatakan tidak senang memanfaatkan benda yang ada di sekitar sehingga tidak memiliki karya, dan sebanyak 5 (1,91%) orang tidak memberikan pernyataan; dan (3) Sebanyak 208 (79,69%) orang menyatakan melek teknologi, sebanyak 28 (10,72%) orang menyatakan tidak melek teknologi, dan sebanyak 25 (9,57%) orang tidak memberikan pernyataan.

Karakter Tarapti – Taliti - Ati-ati

Pada aspek ini digali tiga hal berkaitan dengan karakter *tarapti-taliti-ati-ati*, dari 261 responden, dapat teridentifikasi beberapa hal berikut: (1) Sebanyak 197 (75,48%) orang menyatakan ketelitian menjadi pegangan dalam mengerjakan sesuatu, sebanyak 51 (19,54%) orang menyatakan kesempurnaan menjadi pegangan dalam mengerjakan sesuatu, sebanyak 10 (3,83%) orang menyatakan kecepatan menjadi pegangan dalam mengerjakan sesuatu, dan sebanyak 3 (1,14%) orang tidak memberikan pernyataan; (2) Sebanyak 18 (6,89%) orang menyatakan berbuat adil ketika tidak menguntungkan diri sendiri, sebanyak 26 (9,96%) orang menyatakan berbuat adil ketika menguntungkan diri sendiri, sebanyak 213 (81,61%) orang menyatakan berbuat adil dalam kondisi apapun, dan sebanyak 4 (1,53%) orang tidak memberikan pernyataan; dan (3) Sebanyak 70 (26,81%) orang menyatakan tidak pernah terkena hasutan orang lain, sebanyak 103 (39,46%) orang menyatakan pernah satu kali terkena hasutan orang lain, sebanyak 87 (33,33%) orang menyatakan pernah lebih dari satu kali terkena hasutan orang lain, dan sebanyak 1 (0,38%) orang tidak memberikan pernyataan.

Karakter Junun - Jucung

Pada aspek ini ditanyakan tiga hal berkaitan dengan karakter *junun-jucung*, dari 261 responden, dapat teridentifikasi beberapa hal berikut: (1) Sebanyak 189

(72,41%) orang menyatakan selalu konsisten dalam menjalani sesuatu, sebanyak 60 (22,98%) orang menyatakan kadang-kadang tidak konsisten dalam menjalani sesuatu, dan sebanyak 12 (4,59%) orang tidak memberikan pernyataan; (2) Sebanyak 145 (55,55%) orang menyatakan proses lebih penting daripada hasil, sebanyak 90 (34,48%) orang menyatakan hasil lebih penting daripada proses, sebanyak 21 (8,04%) orang menyatakan tidak terlalu peduli dengan proses dan hasil, dan sebanyak 5 (1,91%) orang tidak memberikan pernyataan; dan (3) Ketika mengalami kegagalan dalam suatu urusan, sebanyak 228 (87,35%) orang menyatakan biasa mengusahakan kembali untuk meraihnya, sebanyak 24 (9,19%) orang menyatakan mengganti dengan mengusahakan hal lainnya, sebanyak 4 (1,53%) orang menyatakan tidak pernah gagal dalam urusan apapun, dan sebanyak 5 (1,91%) orang tidak memberikan pernyataan.

Karakter Punjul - Luhung

Pada aspek ini ditanyakan tiga hal berkaitan dengan karakter *punjul-luhung*, dari 261 responden, dapat teridentifikasi beberapa hal berikut: (1) Ketika menghadapi masalah, sebanyak 207 (79,31%) orang menyatakan selalu berani mengambil keputusan apapun risikonya, sebanyak 49 (18,77%) orang menyatakan kurang berani dalam mengambil keputusan, dan sebanyak 5 (1,91%) orang tidak memberikan pernyataan; (2) Sebanyak 89 (34,09%) orang menyatakan

memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang seni, sebanyak 97 (37,16%) orang menyatakan memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang olahraga, sebanyak 15 (5,74%) orang menyatakan memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang teknologi, sebanyak 50 (19,15%) orang menyatakan memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang lainnya, dan sebanyak 10 (3,83%) orang tidak memberikan pernyataan; (3) Dalam melakukan pekerjaan, sebanyak 156 (59,77%) orang menyatakan selalu berusaha dan memberikan yang terbaik, sebanyak 90 (34,48%) orang menyatakan biasa bekerja sesuai kemampuan, sebanyak 12 (4,59%) orang menyatakan biasa bekerja sesuai keinginan/*mood*, dan sebanyak 3 (1,14%) orang tidak memberikan pernyataan.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pada dasarnya lebih penting dari pada sekedar membuat kebijakan. Dengan kata lain, "*the execution of policies will remain dreams if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented*" (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapat dalam arsip kalau tidak diimplementasikan) (Udoji, 1981; Wahab Solichin, 1997; Yanti & Hartutiningsih, 2017). Berdasarkan kondisi yang terjadi di

Kabupaten Sumedang, setelah terbentuk Perbup SPBS, diperlukan regulasi atau kebijakan lanjutan yang disebut oleh Abidin (2006) sebagai kebijakan teknis, agar Perbup SPBS benar-benar dapat diimplementasikan dengan tahapan yang baik disertai dengan tahapan untuk evaluasi kebijakannya.

Untuk keberhasilan pendidikan karakter, sejumlah pemikir pendidikan telah mengeluarkan konsep-konsep pendidikan karakter. Seperti Kohlberg (1978), yang membagi perkembangan karakter siswa pada tiga tahapan, yaitu *pre-conventional reasoning*, *conventional reasoning*, dan *post-conventional reasoning*. Berbeda dengan Kohlberg, pemikir lainnya yaitu Lockheed and Verspoor (1991) merumuskan konsep bahwa pendidikan karakter dilakukan melalui empat tahapan, yaitu tahap *initial stage*, *formal stage*, *transitional stage*, dan tahap *the stage of meaning*. Penekanan dari kedua konsep tersebut, Kohlberg menekankan pada kematangan kognitif siswa, sementara Lockheed and Verspoor menekankan pada kematangan siswa untuk meresapi dan memahami perilakunya serta untuk melembagakan perilakunya. Untuk pelaksanaan pendidikan karakter, Lickona memberikan 10 pilar ciri pendidikan karakter, yaitu *trustworthiness*, *respect*, *responsibility*, *fairness*, *caring*, *honesty*, *courage*, *diligence*, *integrity*, dan *citizenship* (Lickona, 2009; Wahyu, 2011). Melalui beragam konsep tersebut, dapat

diidentifikasi bahwa pada dasarnya menerapkan pendidikan karakter memerlukan desain atau tahapan-tahapan yang jelas. Dengan demikian, diperlukan kejelasan pula mengenai tahapan-tahapan dalam menerapkan nilai-nilai karakter *kasundaan* untuk tataran pendidikan formal khususnya di sekolah dasar di Kabupaten Sumedang. Hal ini yang perlu ditindaklanjuti dari dikeluarkannya peraturan Bupati Sumedang tentang SPBS, terutama untuk meningkatkan kemampuan para guru di Sumedang dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari kerja profesionalnya (Fahdini, Mulyadi, Suhandani, & Julia, 2014; Suhandani & Julia, 2014).

Berdasarkan hasil survey terhadap kesepuluh nilai-nilai karakter *kasundaan*, maka dapat teridentifikasi bahwa pada mayoritas peserta didik sudah memiliki perilaku sebagaimana diharapkan dalam konteks nilai *kasundaan* berdasarkan Perbup Sumedang tentang SPBS. Namun demikian, sebagian kecil lainnya notabene menunjukkan perilaku yang belum sesuai harapan, seperti peserta didik yang kurang taat dalam menjalankan kewajiban agama, atau peserta didik yang mengakui bahwa perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya, enggan untuk meminta maaf jika berbuat kesalahan, menganggap demokrasi itu tidak penting, tidak selamanya bersikap jujur, tidak suka berkerja sama, kurang kreatif, kurang hati-hati dan teliti, tidak peduli dengan proses

atau pun hasil dari pekerjaan, dan kurang berani dalam mengambil keputusan. Hal ini menjadi potensi peserta didik untuk mengarah pada perilaku negatif. Oleh sebab itu, sebagian peserta didik yang memberikan pernyataan yang belum sesuai dengan indikator nilai-nilai *kasundaan*, adalah menjadi tanggung jawab pihak-pihak terkait untuk menerapkan nilai-nilai *kasundaan* agar lebih terinternalisasi ke dalam perilaku peserta didik, internalisasi dalam arti menyatunya nilai dalam diri seseorang (Fardus, 2010; Mulyana, 2004).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan karakter *kasundaan* di sekolah dasar di Kabupaten Sumedang dilakukan tanpa berlandaskan kepada Perbup tentang SPBS, namun merujuk pada kurikulum sekolah saja. Belum ada integrasi antara Perbup tentang SPBS dengan kurikulum di sekolah, sehingga nilai-nilai karakter *kasundaan* dalam Perbup tentang SPBS belum terimplementasikan secara terstruktur pada tataran sekolah dasar. Oleh sebab itu, hasil dari implementasi karakter *kasundaan* khususnya pada jenjang sekolah dasar, meskipun mayoritas peserta didik sudah menunjukkan indikator yang baik, namun minoritas peserta didik teridentifikasi memiliki potensi untuk berperilaku kepada arah yang kurang baik, sehingga perlu diperjelas lagi desain pendidikan karakter

kasundaan beserta tahapan-tahapan dan evaluasinya di sekolah dasar.

REFERENSI

- Abidin, S. Z. (2006). *Kebijakan publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Bappeda. (2009). *Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda*. Retrieved from http://bappeda.sumedangkab.go.id/download.php?file=PERBUP%20113_THN2009 TTG SPBSL.pdf/.
- Dharmawan, N. S. (2014). Implementasi pendidikan karakter bangsa Pada mahasiswa di perguruan tinggi. *Makalah dipresentasikan pada Pembinaan Pendidikan Karakter bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII, Universitas Udayana Denpasar*.
- Fahdini, R., Julia, & Suhandani, D. (2015). *Implementasi Pendidikan Karakter Kasundaan Sebagai Upaya Membangun Budaya dan Karakter Bangsa (Survei Pada Anak SMA di Kabupaten Sumedang)*. Sumedang: Bappeda Kab. Sumedang. Tidak Dipublikasikan.
- Fahdini, R., Mulyadi, E., Suhandani, D., & Julia. (2014). Identifikasi Kompetensi Guru Sebagai Cerminan Profesionalisme Tenaga Pendidik Di Kabupaten Sumedang. *Mimbar Sekolah Dasar*, 1(1). doi:10.17509/mimbar-sd.v1i1.1362
- Fardus. (2010). Model Pendidikan Nilai Sosial Budaya dalam Keluarga dan Lingkungan Manusia Bajo di Bajoe. *Jurnal Educationist*, IV(1), 57-66.
- Kohlberg, L. (1978). Revisions in the theory and practice of moral development. *New directions for child and adolescent development*, 1978(2), 83-87.
- Kurniawan, B. H. (2010). Yakinlah Anda Pasti Bisa Sukses. In: Solo: Pustaka Iltizam.
- Lickona, T. (2009). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books.
- Lockheed, M. E., & Verspoor, A. M. (1991). *Improving primary education in developing countries*. Washington, D.C: Published for the World Bank, Oxford University Press.
- Majid, A. (2011). *Taqwa Dasar Pembentukan Karakter*. In D. Budimansyah & K. Komalasari (Eds.), *Pendidikan Karakter: Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Mansur, H. (2014). Implementasi Pendidikan Karakter Di Satuan Pendidikan. In: Artikel LPMP SulSel Desember.
- Mardiyansyah, D., & Senda, I. (2011). *Keajaiban Berperilaku Positif: Tangga Pustaka*.
- Marzuki. (2013). Revitalisasi Pendidikan Agama Di Sekolah Dalam Pembangunan Karakter Bangsa Di Masa Depan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(1).
- Mulyana, R. (2004). *Mengartikulasikan pendidikan nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Nugraha, A. R., Komariah, K., & Subekti, P. (2014). FUNGSI HUMAS PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENGKAMPANYEKAN SUMEDANG SEBAGAI PUSEUR BUDAYA SUNDA (SPBS). *edutech*, 13(1).
- Pemerintah, R. (2010). *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pikiran-rakyat.com. (2014). Masih Ada Pelajar SMP Pesta Miras Oplosan di Sumedang. Retrieved from <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2014/12/19/309139/masih-ada-pelajar-smp-pesta-miras-oplosan-di-sumedang>
- Rikatri, A. (2016). DAMPAK KEBIJAKAN SUMEDANG PUSEUR BUDAYA SUNDA TERHADAP PENANAMAN NILAI-NILAI KESUNDAAN. Universitas Pendidikan Indonesia,
- Suhandani, D., & Julia. (2014). Identifikasi Kompetensi Guru Sebagai Cerminan Profesionalisme Tenaga Pendidik Di Kabupaten Sumedang (Kajian Pada Kompetensi Pedagogik). *Mimbar Sekolah Dasar*, 1(2), 128-141. doi:10.17509/mimbar-sd.v1i2.874
- Udoji, C. J. (1981). *The African Public Servant as a Public Policy in Africa*. Addis Abeba: African Association for Public Administration and Management.
- Wahab Solichin, A. (1997). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. In: Malang: Kebijakan Publik Intermedia.

- Wahyu. (2011). Masalah dan Usaha Membangun Karakter Bangsa. In D. Budimansyah & K. Komalasari (Eds.), *Pendidikan Karakter: Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Yanti, N. R. D., & Hartutiningsih, S. (2017). IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT.